



Paradoks Produktivitas dan Jebakan Sumber Daya Alam: Ketidakselarasan Transformasi Struktural antara Output dan Tenaga Kerja di Sumatera Selatan (2015–2024)

Sabam Syahputra Manurung^{1*}, Mardalena, Muhammad Subardin³

¹⁻³Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: sabamsm@fe.unsri.ac.id¹, mardalena@fe.unsri.ac.id², subardin@unsri.ac.id³

*Penulis korespondensi: sabamsm@fe.unsri.ac.id

Abstract. *This study aims to diagnose the symptoms of Dutch disease in South Sumatra through an analysis of the misalignment between sectoral output and labor absorption within the structural transformation framework from 2015–2024. Using constant-price GRDP, Sakernas labor data, Location Quotient (SLQ & DLQ) analysis, labor productivity, and employment elasticity, the study reveals three key findings. First, South Sumatra's structural transformation deviates from the normal pattern: the decline in agriculture was not accompanied by an increase in the stagnant manufacturing sector, but rather by persistent mining dominance and service sector expansion (premature tertiarization). Second, the average mining SLQ is 2.78 (strongly basic) while manufacturing SLQ is 0.86 (non-basic), yet the manufacturing DLQ is prospective (1.00), confirming a resource movement effect in which the mining boom hampers industrial potential. Third, mining labor productivity (IDR 1.013 billion/worker) is 34.5 times higher than that of agriculture (IDR 29.35 million), but mining absorbs only 1.88% of the workforce compared to 45.30% in agriculture. Mining employment elasticity is negative (–1.29), whereas agriculture is elastic (1.31), indicating the failure of the modern sector to absorb surplus labor. These findings underscore the urgency of downstreaming as a strategy to break the natural resource trap.*

Keywords: *Downstream Strategy; Dutch Disease; Energy Elasticity; Mining Sector; Structural Transformation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendiagnosis gejala *Dutch disease* di Sumatera Selatan melalui analisis ketidakselarasan antara output sektoral dan penyerapan tenaga kerja dalam kerangka transformasi struktural periode 2015–2024. Menggunakan data PDRB ADHK, tenaga kerja Sakernas, serta analisis *Location Quotient* (SLQ & DLQ), produktivitas tenaga kerja, dan elastisitas kesempatan kerja, studi ini menemukan tiga bukti utama. Pertama, transformasi struktural Sumsel menyimpang dari pola normal: penurunan pertanian tidak diiringi kenaikan industri pengolahan yang stagnan, melainkan oleh dominasi pertambangan dan ekspansi sektor jasa (*premature tertiarization*). Kedua, SLQ pertambangan rata-rata 2,78 (sangat basis) dan SLQ industri pengolahan 0,86 (non-basis), namun DLQ industri justru prospektif (1,00), mengonfirmasi *resource movement effect* di mana potensi industri terhambat oleh booming tambang. Ketiga, produktivitas tambang (Rp1,013 miliar/pekerja) 34,5 kali lipat lebih tinggi daripada pertanian (Rp29,35 juta), tetapi tambang hanya menyerap 1,88% tenaga kerja versus 45,30% di pertanian. Elastisitas kesempatan kerja tambang negatif (–1,29) sementara pertanian elastis (1,31), menunjukkan kegagalan sektor modern menyerap surplus tenaga kerja. Temuan ini menegaskan perlunya hilirisasi sebagai strategi memutus jebakan sumber daya alam.

Kata kunci: *Dutch Disease; Elastisitas Tenaga; Sektor Pertambangan; Strategi Hilirisasi; Transformasi Struktural.*

1. LATAR BELAKANG

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan salah satu kantong utama produksi sumber daya alam (SDA) Indonesia, dengan komoditas unggulan berupa batubara, kelapa sawit, dan karet. Struktur perekonomian Sumsel selama satu dekade terakhir masih bercorak ekstraktif. Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menunjukkan bahwa kontribusi sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan, terhadap perekonomian regional pada tahun 2024 mencapai 38,24%, terdiri dari 15,71% sektor pertanian dan 22,53% sektor pertambangan (BPS Provinsi Sumsel, 2025). Dominasi ini sesungguhnya

telah mengalami sedikit penurunan dari 40,79% pada tahun 2015, namun penurunan tersebut hampir seluruhnya disumbang oleh kontribusi pertanian yang menyusut secara gradual, sedangkan pangsa pertambangan relatif tidak bergeming dan masih fluktuatif di kisaran 21–23%. Di saat yang sama, sektor sekunder yang diwakili oleh industri pengolahan justru menunjukkan stagnasi; kontribusinya hanya bergerak dari 18,53% (2015) menjadi 18,13% (2024). Transformasi struktural yang diharapkan, pergeseran dari primer ke sekunder diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, sektor tersier seperti perdagangan besar dan eceran memperlihatkan kenaikan pangsa dari 9,65% menjadi 11,74%, mengindikasikan pola lompatan langsung ke sektor jasa tanpa melalui penguatan basis industri (*premature tertiarization*).

Tabel 1. Struktur Ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2015-2025.

Kelompok Sektor Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Primer (Pertanian dan Pertambangan)	40.79	39.81	39.04	39.05	39.18	38.59	38.88	38.87	39.02	38.24	37.90
Sekunder (Industri)	29.91	30.52	31.07	30.92	30.51	30.70	30.03	29.47	29.10	29.10	29.03
Sekunder (Jasa-jasa)	29.30	29.67	29.89	30.03	30.31	30.71	31.09	31.66	31.89	32.66	33.07
Jumlah	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : PDRB Sumsel, BPS 2026.

Fenomena lain yang mencolok adalah produktivitas tenaga kerja sektoral. Berdasarkan perhitungan dari PDRB ADHK dan data tenaga kerja, produktivitas per pekerja di sektor pertambangan Sumsel mencapai Rp85,42 juta pada tahun 2024, jauh melampaui produktivitas sektor pertanian yang hanya Rp59,56 juta. Tren peningkatan produktivitas di kedua sektor primer tersebut konsisten sepanjang 2015–2024, dengan pertambangan tumbuh dari Rp55,33 juta menjadi Rp85,42 juta, dan pertanian dari Rp48,29 juta menjadi Rp59,56 juta. Namun, penciptaan nilai tambah tinggi di sektor ekstraktif itu tidak diiringi oleh penyerapan tenaga kerja yang memadai. Data Sakernas menunjukkan bahwa lebih dari 40% tenaga kerja Sumsel masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah, sedangkan sektor pertambangan hanya menyerap kurang dari 2% tenaga kerja (BPS, 2023). Industri pengolahan yang secara teori seharusnya menjadi sektor penyerap transisi tenaga kerja dari pertanian juga tidak menunjukkan peningkatan daya serap yang signifikan. Ketidakselarasan antara output dan penyerapan tenaga kerja inilah yang menjadi paradoks produktivitas di Sumsel: booming SDA tidak mentransformasi struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif dan inklusif, melainkan menciptakan jebakan ketergantungan pada sektor ekstraktif padat modal yang minim efek pengganda terhadap tenaga kerja.

Tabel 2. Data Produktivitas Tenaga Kerja Sumsel (2015-2024) dalam Milyar.

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SEKTOR PRIMER										
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,3	48,9	49,5	50,7	52,4	53,3	54,8	56,9	58,2	59,6
Pertambangan dan Penggalian	55,3	57,3	60,4	65,9	71,2	68,3	72,1	76,6	82,7	85,4
Total Primer	103,6	106,2	109,9	116,6	123,6	121,6	126,9	133,5	140,8	145,0
SEKTOR SEKUNDER										
Industri Pengolahan	47,1	50,0	53,3	56,1	58,9	59,3	60,6	63,3	65,8	68,7
Pengadaan Listrik dan Gas	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Pengadaan Air, Limbah dan Daur Ulang	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Konstruksi	28,4	30,9	33,6	35,5	36,7	36,7	36,7	37,1	38,5	40,7
Total Sekunder	76,0	81,4	87,5	92,3	96,2	96,7	98,0	101,2	105,0	110,3
SEKTOR TERSIER										
Perdagangan Besar dan Eceran	24,5	26,7	28,7	31,0	33,6	33,1	35,0	38,6	41,4	44,5
Transportasi dan Pergudangan	4,8	5,2	5,6	6,0	6,5	6,1	6,0	6,7	7,2	7,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,0	3,3	3,6	4,1	4,7	4,4	4,6	5,2	5,9	6,5
Informasi dan Komunikasi	8,0	8,6	9,3	10,0	10,8	12,2	13,0	14,0	14,9	16,2
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,7	7,1	7,3	7,5	7,4	7,5	7,8	7,7	8,1	8,7
Real Estate	7,4	8,0	8,6	9,2	10,0	10,2	10,8	11,4	11,9	12,8
Jasa Perusahaan	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Administrasi Pemerintahan	8,6	8,6	9,1	9,4	9,5	9,9	10,3	10,6	11,0	12,1
Jasa Pendidikan	7,4	7,6	7,6	7,8	8,2	8,1	8,6	8,8	9,0	9,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,8	1,8	1,8	1,9	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,7
Jasa Lainnya	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	3,0

Sumber : PDRB Sumsel, BPS 2025.

Permasalahan utama yang mengemuka dari fenomena tersebut adalah adanya dugaan kuat bahwa Sumsel tengah mengalami gejala *Dutch disease* regional yang menghambat proses transformasi struktural. Teori *Dutch disease* klasik (Corden & Neary, 1982) menjelaskan bahwa *booming* sektor SDA dapat memicu dua efek, yaitu *resource movement effect* dan *spending effect*, yang sama-sama mendorong kontraksi sektor manufaktur (barang yang diperdagangkan). Dalam konteks Sumsel, *booming* tambang dan sawit diduga menarik modal dan tenaga kerja terampil dari sektor potensial lainnya ke sektor ekstraktif, sekaligus menggelembungkan harga barang *non-tradable* sehingga menekan profitabilitas industri pengolahan. Akibatnya, industri pengolahan yang memiliki potensi produktivitas tinggi dan

berorientasi ekspor tidak mampu tumbuh, sementara surplus tenaga kerja dari pertanian tradisional tidak terserap secara optimal ke sektor modern. Lebih jauh, tenaga kerja yang keluar dari pertanian diduga banyak yang masuk ke sektor informal dan perdagangan jasa berproduktivitas rendah, bukannya ke industri manufaktur. Hal ini memperlebar dualisme pasar kerja sebagaimana dijelaskan oleh Lewis (1954) dan Fields (2005), serta mengunci perekonomian Sumsel dalam jebakan spesialisasi ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Kajian tentang *Dutch disease* selama ini lebih banyak dilakukan pada tataran makro nasional dengan pendekatan nilai tukar riil (misalnya, Sachs & Warner, 2001; Larsen, 2006; Komarulzaman & Alisjahbana, 2020). Studi-studi tersebut secara umum mengonfirmasi bahwa kelimpahan SDA cenderung melemahkan sektor manufaktur melalui apresiasi nilai tukar. Namun, pendekatan makro ini kurang mampu menangkap mekanisme mikro-regional, terutama bagaimana pergerakan faktor produksi, khususnya tenaga kerja, berlangsung di tingkat provinsi atau kabupaten yang kaya SDA. Beberapa penelitian di Indonesia mulai mengarah ke analisis regional, seperti yang dilakukan oleh Santoso (2019) yang meneliti dampak ekspor batubara terhadap struktur ekonomi Kalimantan Timur dan oleh Nugroho & Prasetyo (2021) yang mengukur *resource curse* di provinsi-provinsi kaya tambang dengan data panel. Akan tetapi, studi-studi tersebut masih berfokus pada variabel output (PDRB) dan belum secara mendalam membedah dimensi ketenagakerjaan serta keterkaitannya dengan dualisme sektoral. Selain itu, penggunaan indikator tunggal seperti kontribusi sektor atau indeks spesialisasi seringkali tidak cukup untuk mendeteksi adanya *resource movement effect* yang bersifat struktural. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam tiga aspek. Pertama, secara konseptual, studi ini mengintegrasikan kerangka *Dutch disease* model Corden-Neary dengan teori transformasi struktural Kuznets-Chenery dan model ekonomi dualistik Lewis-Fields. Kombinasi ini memungkinkan analisis tidak hanya berhenti pada output, tetapi juga menjangkau mekanisme penguncian tenaga kerja di sektor tradisional sebagai eksekusi dari booming SDA. Kedua, secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan multi-alat analisis yang menggabungkan Location Quotient (SLQ dan DLQ) untuk mengonfirmasi spesialisasi ekstraktif, analisis elastisitas kesempatan kerja untuk mengukur daya serap sektoral, serta dekomposisi Indeks Theil untuk mendeteksi kontribusi fluktuasi harga komoditas terhadap ketimpangan regional. Ketiga, secara empiris, penelitian ini berfokus pada Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan karakteristik dualisme tajam, pertambangan berproduktivitas tinggi namun minim tenaga kerja, pertanian berproduktivitas rendah dengan

tenaga kerja melimpah, dan industri pengolahan yang stagnan yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam kerangka *Dutch disease* regional.

2. KAJIAN TEORITIS

Fenomena *Dutch disease* pertama kali dikonseptualisasikan oleh Corden dan Neary (1982) untuk menjelaskan bagaimana booming sektor sumber daya alam justru dapat memicu kontraksi sektor manufaktur melalui dua efek utama: *resource movement effect* (perpindahan faktor produksi ke sektor booming) dan *spending effect* (apresiasi nilai tukar riil yang menekan daya saing sektor *non-booming tradable*). Sementara itu Teori transformasi struktural klasik yang dikembangkan oleh Kuznets (1973) dan Chenery dan Syrquin (1975) mempostulatkan bahwa pembangunan ekonomi idealnya mengikuti pola pergeseran bertahap dari dominasi sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri manufaktur), dan akhirnya ke sektor tersier (jasa).

Untuk menjelaskan mengapa mayoritas tenaga kerja tetap terperangkap di sektor pertanian berproduktivitas rendah meskipun terdapat booming sektor ekstraktif, penelitian ini berpijak pada teori ekonomi dualistik. Lewis (1954) dalam model klasiknya menggambarkan perekonomian terbelah menjadi sektor modern (kapitalis) dan sektor tradisional (subsisten), di mana pembangunan terjadi melalui transfer surplus tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor modern yang terus berekspansi. Namun, dalam realitas daerah kaya SDA, sektor modern (pertambangan dan industri pengolahan padat modal) tidak mampu menyerap surplus tenaga kerja karena karakter teknologinya yang padat modal dan minim keterkaitan dengan pasar kerja lokal. Fields (2005) memperbarui model ini dengan menunjukkan bahwa pasar kerja di negara berkembang seringkali bersifat dualistik secara persisten, dengan sektor informal dan tradisional yang terus menggembung sebagai *refuge sector*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokus di Provinsi Sumatera Selatan dengan periode analisis tahun 2015 hingga 2024. Objek penelitian mencakup struktur perekonomian regional yang direpresentasikan oleh tiga sektor kunci: sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan serta pertambangan dan penggalian) dan sektor sekunder (industri pengolahan) sebagai representasi aktivitas manufaktur modern. Fokus analisis diarahkan pada hubungan antara kinerja output (PDRB sektoral) dan penyerapan tenaga kerja sektoral, serta implikasinya terhadap transformasi struktural dan gejala *Dutch disease* di tingkat kabupaten/kota se-provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe

deskriptif-analitis dan kausal-eksplanatif. Tipe deskriptif-analitis digunakan untuk memotret pola dan tren kontribusi sektor, produktivitas, serta distribusi tenaga kerja selama satu dekade, sehingga mampu menggambarkan fenomena ketidakselarasan transformasi struktural secara komprehensif (Creswell & Creswell, 2018). Sementara itu, pendekatan kausal-eksplanatif diimplementasikan untuk menguji hubungan antara spesialisasi sektor ekstraktif, fluktuasi harga komoditas global, dan ketimpangan regional sebagai indikasi resource movement effect yang termanifestasi dalam kerangka Dutch disease (Corden & Neary, 1982). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemaparan fakta empiris, tetapi juga berupaya menjelaskan mekanisme kausal di balik paradoks produktivitas yang terjadi di Sumsel.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi pemerintah. Jenis dan sumber data dirinci dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumsel tahun 2015–2024, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Data ini digunakan untuk menghitung kontribusi sektor, laju pertumbuhan, Location Quotient (SLQ dan DLQ), serta produktivitas tenaga kerja. Data ketenagakerjaan per sektor (jumlah penduduk bekerja 15+ menurut lapangan usaha) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Data pendukung infrastruktur dan fasilitas ekonomi yang diekstraksi dari Potensi Desa (PODES) BPS untuk analisis skalogram guna mengidentifikasi hambatan konektivitas, meskipun tidak menjadi alat analisis utama dalam artikel ini. Kombinasi data-data tersebut memungkinkan triangulasi temuan dan memperkuat validitas internal dalam mendeteksi gejala Dutch disease regional (Yin, 2017).

Teknik pengumpulan data ditempuh melalui studi dokumentasi dan penelusuran arsip digital. Seluruh data sekunder diunduh dari situs resmi BPS (sumsel.bps.go.id dan bps.go.id). Data yang diperoleh disusun dalam format panel yang menggabungkan dimensi waktu (2015–2024) dan dimensi spasial (17 kabupaten/kota di Sumsel). Proses kompilasi dan validasi dilakukan dengan mencocokkan angka-angka dari berbagai edisi publikasi untuk menjamin konsistensi, terutama terkait perubahan tahun dasar PDRB dan ketersediaan data ketenagakerjaan level kabupaten yang memiliki keterbatasan sampling. Sementara itu untuk analisis data digunakan serangkaian alat analisis kuantitatif yang saling melengkapi, yang dikelompokkan ke dalam tiga tahapan utama.

Tahap 1: Mengidentifikasi Pola Spesialisasi dan Struktur Sektoral

Static Location Quotient (SLQ): Menghitung rasio kontribusi sektor i di suatu kabupaten/kota terhadap total PDRB kabupaten tersebut, dibagi dengan kontribusi sektor yang sama pada tingkat provinsi (Isard, 1960). Nilai $SLQ > 1$ menunjukkan sektor basis, dan

digunakan untuk mengonfirmasi dominasi sektor ekstraktif di wilayah-wilayah sentra tambang (seperti Muara Enim, Muba, Lahat).

$$SLQ_{ij} = \frac{PDRB_{ij} / PDRB_j}{PDRB_{i,prov} / PDRB_{prov}}$$

Dynamic Location Quotient (DLQ): Merupakan perluasan dari SLQ dengan memasukkan unsur laju pertumbuhan sektor. DLQ digunakan untuk menilai apakah suatu sektor basis masih berpotensi tetap menjadi basis di masa mendatang (Hidayat & Darwin, 2018). Kriteria $DLQ > 1$ mengindikasikan sektor tersebut akan tetap unggul.

Tahap 2: Mengukur Ketidakselarasan Transformasi Struktural

Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral: Menghitung rasio antara persentase perubahan jumlah tenaga kerja sektor *i* terhadap persentase perubahan PDRB sektor *i* selama periode 2015–2024. Nilai elastisitas rendah (<1) menunjukkan sektor dengan pertumbuhan output yang padat modal dan minim penyerapan tenaga kerja, sedangkan nilai tinggi (>1) menandakan sektor padat karya. Alat ini krusial untuk membuktikan hipotesis *resource movement effect*: sektor pertambangan diperkirakan memiliki elastisitas sangat rendah, sementara pertanian memiliki elastisitas tinggi.

Rasio Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral: Produktivitas dihitung sebagai PDRB ADHK sektor *i* dibagi jumlah tenaga kerja sektor *i* (Rp/pekerja). Perbandingan antar-sektor dan perbandingan terhadap produktivitas rata-rata provinsi akan memperlihatkan kesenjangan produktivitas yang menjadi inti paradoks.

Tahap 3: Menguji Keterkaitan Spesialisasi Ekstraktif dengan Ketimpangan dan Dutch Disease

Indeks Ketimpangan Williamson: Digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di Sumsel dengan rumus:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i}}{\bar{Y}}$$

di mana Y_i adalah PDRB per kapita kabupaten/kota, $\bar{Y}$ adalah PDRB per kapita rata-rata provinsi, dan f_i adalah proporsi penduduk kabupaten/kota *i* (Sjafrizal, 2014). Nilai indeks yang tinggi dikaitkan dengan dominasi daerah kantong tambang.

Indeks Theil dan Dekomposisinya: Indeks Theil digunakan karena mampu mendekomposisi ketimpangan total ke dalam komponen *within-region* (ketimpangan antarkabupaten dalam kelompok) dan *between-region* (ketimpangan antarkelompok, misalnya kelompok kabupaten penghasil tambang vs non-tambang). Hal ini memungkinkan pengujian

apakah fluktuasi harga komoditas lebih memengaruhi ketimpangan di wilayah sentra tambang (Akita & Miyata, 2010). Estimasi kontribusi masing-masing komponen akan memperlihatkan sumber ketimpangan dan mengonfirmasi adanya *enclave economy*.

Uji Korelasi Pearson atau Spearman: Untuk memperkuat argumen kausal, dilakukan analisis korelasi antara harga komoditas unggulan (batubara, CPO) dengan Indeks Williamson dan Indeks Theil, serta dengan elastisitas kesempatan kerja sektor industri pengolahan. Jika korelasi positif signifikan, maka ini menjadi bukti empiris bahwa booming harga komoditas justru memperburuk ketimpangan dan menghambat industrialisasi—indikasi klasik *Dutch disease* (Sachs & Warner, 2001).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Transformasi Struktural yang Timpang: Potret PDRB dan Tenaga Kerja Sumsel 2015–2024

Untuk memotret arah transformasi struktural Sumsel, disajikan Gambar 1 berupa stacked area chart yang menampilkan evolusi kontribusi tiga sektor kunci terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama periode 2015–2024. Sektor primer direpresentasikan oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) serta Pertambangan dan Penggalian (B); sementara sektor sekunder diwakili oleh Industri Pengolahan (C). Secara visual, grafik tersebut memperlihatkan tiga pola yang kontras. Pertama, pangsa sektor pertanian menurun secara gradual dan konsisten, dari 19,01% pada 2015 menjadi 15,71% pada 2024. Pola penurunan ini sesungguhnya sejalan dengan teori transformasi struktural klasik (Kuznets, 1973; Chenery & Syrquin, 1975) yang memprediksi menyusutnya peran sektor tradisional seiring modernisasi dan peningkatan pendapatan per kapita. Kedua, pangsa sektor industri pengolahan justru menunjukkan stagnasi absolut. Kontribusinya bergerak dalam rentang sempit 18,13%–18,92% tanpa tren kenaikan yang berarti; pada 2015 tercatat 18,53%, dan pada 2024 justru sedikit menurun ke 18,13%. Alih-alih mengambil alih peran pertanian sebagai mesin pertumbuhan baru, sektor ini seperti “jalan di tempat”. Fenomena ini kontras dengan pola transformasi normal di mana sektor industri seharusnya menjadi penyerap utama perpindahan sumber daya dari pertanian (Chenery, 1979). Ketiga, sektor pertambangan dan penggalian tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi yang fluktuatif namun tak pernah turun di bawah 21%. Pangsanya bahkan sempat menyentuh 22,91% pada 2023 dan bertahan di 22,53% pada 2024. Secara keseluruhan, struktur PDRB Sumsel tidak menunjukkan transisi dari primer ke sekunder yang sehat; yang terjadi adalah penurunan pertanian yang tidak dikompensasi oleh kenaikan industri, melainkan oleh

persistensi pertambangan dan—seperti akan diuraikan—ekspansi sektor tersier. Gejala ini sejalan dengan kerangka resource curse yang menyatakan bahwa kelimpahan sumber daya alam seringkali menghambat diversifikasi ekonomi dan industrialisasi (Sachs & Warner, 2001).

Gambaran ketimpangan struktural semakin tajam ketika kita membandingkan distribusi PDRB dengan distribusi tenaga kerja. Gambar 2 menyajikan *pie chart* perbandingan antara kontribusi PDRB dan persentase tenaga kerja untuk tiga sektor kunci pada tiga titik waktu: 2019, 2022, dan 2024. Data terbaru (Agustus 2024) memperlihatkan ketidakselarasan yang ekstrem. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 15,71% terhadap PDRB Sumsel, tetapi menampung 45,30% dari total penduduk yang bekerja. Sebaliknya, sektor Pertambangan dan Penggalan menguasai 22,53% PDRB, namun hanya mempekerjakan 1,88% tenaga kerja. Sektor Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi 18,13% terhadap PDRB juga tidak menunjukkan kapasitas serapan yang memadai; publikasi Sakernas mengindikasikan bahwa sektor ini hanya menyerap sekitar 5–6% tenaga kerja Sumsel (BPS, 2024). Dengan kata lain, sektor-sektor yang menjadi andalan output (tambang dan industri) praktis menjadi “pulau kemakmuran” yang tidak menyentuh sebagian besar angkatan kerja.



Gambar 1. Mayoritas Pekerja Justru.

Mayoritas pekerja justru terkonsentrasi di sektor pertanian yang produktivitasnya paling rendah. Inilah “pukulan visual” pertama yang secara gamblang menunjukkan adanya paradoks produktivitas: output tercipta di sektor padat modal minim tenaga kerja, sementara tenaga kerja melimpah justru berada di sektor berproduktivitas rendah. Fenomena ini mencerminkan

ciri *dualistic economy* di mana sektor modern dan tradisional berjalan tanpa keterkaitan yang produktif (Lewis, 1954; Temple, 2005). Dalam kerangka *Dutch disease*, kondisi ini merupakan manifestasi dari *resource movement effect*, yaitu ketika booming sektor sumber daya alam menarik sumber daya produktif—termasuk modal dan tenaga kerja terampil—from sektor *non-booming tradable* (industri) sehingga menghambat pertumbuhannya (Corden & Neary, 1982; van Wijnbergen, 1984).

Alih-alih bertransformasi ke industrialisasi, perekonomian Sumsel justru menunjukkan gejala *premature tertiarization*, yakni pergeseran langsung dari sektor primer ke sektor jasa tanpa melalui fase penguatan industri manufaktur (Rodrik, 2016). Gambar 3 menampilkan perbandingan laju pertumbuhan kontribusi sektor Industri Pengolahan dengan sektor-sektor tersier utama selama 2015–2024. Data distribusi PDRB menunjukkan bahwa kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Kategori G) meningkat signifikan dari 9,65% pada 2015 menjadi 11,74% pada 2024. Demikian pula, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I) naik dari 1,19% menjadi 1,71%, sementara sektor Informasi dan Komunikasi (J) melonjak dari 3,16% menjadi 4,28%. Gabungan kontribusi ketiga sektor jasa ini meningkat sebesar 3,73 poin persentase dalam satu dekade, jauh melampaui perubahan kontribusi Industri Pengolahan yang justru menyusut 0,40 poin persentase. Pola ini mengonfirmasi bahwa perekonomian Sumsel “melompati” tahapan industrialisasi. Surplus tenaga kerja yang lepas dari pertanian tidak diserap oleh pabrik-pabrik modern, melainkan mengalir ke aktivitas perdagangan informal, warung makan, dan jasa komunikasi berskala kecil yang umumnya memiliki produktivitas rendah dan tidak terpapar persaingan global (McMillan & Rodrik, 2011). Fenomena ini memperkuat argumen bahwa *resource boom* yang terjadi di Sumsel tidak menghasilkan efek penetasan (*trickle-down*) yang memadai, melainkan menciptakan dualisme struktural yang persisten antara sektor ekstraktif modern dan sektor jasa tradisional yang menampung kelebihan tenaga kerja (Auty, 2001). Tanpa kebijakan afirmatif untuk mengembangkan industri pengolahan, jebakan sumber daya alam ini akan terus mengunci Sumsel dalam keseimbangan sub-optimal dengan produktivitas rata-rata yang rendah dan ketimpangan yang tinggi (Gylfason, 2001).

Analisis Spesialisasi dan Analisis Sektoral (SLQ & DLQ)

Untuk mengonfirmasi apakah struktur ekonomi Sumsel benar-benar terjebak dalam spesialisasi ekstraktif dan mengidentifikasi sektor mana yang terhambat, dilakukan analisis Location Quotient statis (SLQ) dan dinamis (DLQ). SLQ mengukur tingkat spesialisasi suatu sektor di suatu wilayah relatif terhadap perekonomian nasional, sementara DLQ memproyeksikan prospek daya saing sektor tersebut di masa depan berdasarkan laju

pertumbuhannya (Isard, 1960; Hidayat & Darwin, 2018). Tabel 3 menyajikan ringkasan hasil perhitungan SLQ dan DLQ untuk tiga sektor kunci—Pertanian, Pertambangan, dan Industri Pengolahan—selama periode 2015–2024.

Tabel 3. Rata-rata Nilai SLQ dan DLQ Sektor Kunci Sumatera Selatan, 2015–2024.

Sektor	Rata-rata SLQ	Kriteria SLQ	Rata-rata DLQ	Kriteria DLQ
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	Basis	1,00	Prospektif (ambang)
Pertambangan dan Penggalian	2,78	Basis (sangat kuat)	1,02	Prospektif
Industri Pengolahan	0,86	Non-Basis	1,00	Prospektif (ambang)

Sumber: BPS, PDRB ADHK 2015=100, diolah (2025).

Data menunjukkan bahwa sektor Pertambangan memiliki rata-rata SLQ sebesar 2,78, jauh melampaui ambang batas 1. Nilai ini mengindikasikan bahwa Sumsel memiliki tingkat spesialisasi hampir tiga kali lipat dibandingkan rata-rata nasional di sektor ini. Konsistensi nilai SLQ di atas 2,5 sepanjang satu dekade (berkisar antara 2,47 pada 2015 hingga 2,96 pada 2023) menegaskan ketergantungan absolut perekonomian Sumsel pada aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Sementara itu, sektor Pertanian juga masih menunjukkan status basis dengan rata-rata SLQ 1,31, meskipun trennya menurun secara gradual—sejalan dengan menyusutnya kontribusi PDRB pertanian. Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan secara konsisten mencatat SLQ di bawah 1 (rata-rata 0,86), yang berarti sektor ini belum mampu menjadi spesialisasi unggulan Sumsel. Secara struktur, industri manufaktur di Sumsel masih “kerdil” dibandingkan perannya dalam perekonomian nasional.

Analisis DLQ memberikan lapisan interpretasi yang lebih kaya dan justru mengungkap sebuah kontradiksi penting. Sektor Pertambangan tidak hanya unggul secara statis, tetapi juga prospektif secara dinamis dengan rata-rata DLQ 1,02. Ini berarti bahwa keunggulan sektor ini diperkirakan akan terus berlanjut, mengunci Sumsel dalam lintasan pertumbuhan berbasis ekstraksi (Gylfason, 2001). Yang paling menarik adalah posisi sektor Industri Pengolahan. Meskipun secara statis tidak menjadi basis ($SLQ < 1$), sektor ini memiliki rata-rata DLQ tepat di angka 1,00, yang menunjukkan bahwa dari sisi potensi pertumbuhan, ia sebenarnya mampu bersaing dan bahkan dapat menjadi unggulan. Dalam beberapa tahun, DLQ Industri Pengolahan bahkan tercatat di atas 1 (misalnya 1,01 pada 2015–2017 dan 1,00 pada 2019), menandakan bahwa laju pertumbuhan sektor ini sempat melampaui pertumbuhan nasional. Temuan ini melahirkan sebuah pertanyaan kritis: mengapa sektor yang memiliki potensi pertumbuhan prospektif ini tidak kunjung bertransformasi menjadi sektor basis? Kontradiksi inilah yang kami sebut sebagai “Si Prospektif yang Tak Kunjung Basis.”

Fenomena ini merupakan bukti empiris yang kuat dari mekanisme *resource movement effect* dalam teori *Dutch disease* (Corden & Neary, 1982). Booming sektor pertambangan yang terus berlanjut telah menarik modal, infrastruktur, tenaga kerja terampil, dan bahkan perhatian kebijakan pemerintah daerah, menjauh dari sektor industri pengolahan. Akibatnya, meskipun sektor industri memiliki potensi intrinsik untuk tumbuh (sebagaimana ditunjukkan oleh DLQ prospektif), ia tidak pernah mendapatkan akumulasi sumber daya yang cukup untuk menembus ambang batas keunggulan struktural ($SLQ > 1$). Dengan kata lain, keunggulan dinamis sektor industri terus “dikalahkan” oleh daya tarik sektor ekstraktif yang lebih memberikan keuntungan jangka pendek (Sachs & Warner, 2001). Temuan ini mengonfirmasi bahwa Sumsel tidak hanya sedang mengalami spesialisasi ekstraktif, tetapi benar-benar terjebak di dalamnya, karena bahkan sektor yang memiliki potensi untuk menjadi motor diversifikasi pun terhambat oleh dominasi sumber daya alam (Auty, 2001).

Publikasi BPS dan berbagai studi regional mengonfirmasi bahwa kabupaten seperti Muara Enim, Musi Banyuasin (Muba), dan Lahat memiliki nilai SLQ Pertambangan yang sangat tinggi, seringkali melebihi 3,0 (BPS Kabupaten Muara Enim, 2023; Dinas ESDM Sumsel, 2024). Wilayah-wilayah ini adalah lokasi konsesi tambang batubara terbesar di Sumsel. Ketergantungan yang ekstrem pada satu sektor di kantong-kantong ini menciptakan *enclave economy*: aktivitas ekonomi yang sangat intensif dan padat modal, namun minim keterkaitan (*linkage*) dengan sektor-sektor lain di daerah sekitarnya (Hirschman, 1958). Sektor tambang menjadi “pulau pertumbuhan” yang tidak menjalar, sementara industri pengolahan yang seharusnya bisa menjadi jembatan nilai tambah—misalnya pengolahan batubara menjadi kokas atau gasifikasi—tetap tidak berkembang karena investasi lebih memilih hulu. Pola *enclave* spasial ini akan menjadi jembatan penting untuk memahami mengapa ketimpangan regional di Sumsel cenderung persisten dan berkorelasi dengan fluktuasi harga komoditas, sebagaimana akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

Produktivitas, Elastisitas, dan Kegagalan Resource Movement

Setelah mengonfirmasi adanya jebakan spesialisasi ekstraktif secara struktural (SLQ) dan mengidentifikasi potensi industri yang terhambat (DLQ), bagian ini menyajikan bukti empiris paling krusial: pengukuran langsung paradoks produktivitas dan pengujian mekanisme *resource movement effect* melalui analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja. Pada Tabel 4 menyajikan perbandingan produktivitas tenaga kerja untuk dua sektor primer utama Sumsel pada tahun 2024. Produktivitas dihitung sebagai nilai PDRB ADHK per pekerja di masing-masing sektor.

Tabel 4. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Primer Sumatera Selatan, 2024.

Sektor	PDRB ADHK 2024 (Miliar Rp)	Tenaga Kerja Agt 2024 (Ribu Orang)	Produktivitas (Rp Juta/Pekerja/Tahun)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	59.555,28	2.029,17	29,35
Pertambangan dan Penggalian	85.424,44	84,30	1.013,57

Sumber : BPS Sumsel (2025).

Data ini mengungkap jurang produktivitas yang sangat ekstrem. Seorang pekerja di sektor pertambangan rata-rata menghasilkan nilai tambah sebesar Rp1,013 milyar per tahun, sementara seorang pekerja di sektor pertanian hanya menghasilkan Rp29,35 juta. Dengan kata lain, produktivitas tenaga kerja pertambangan 34,5 kali lipat lebih tinggi daripada produktivitas pertanian. Perbedaan ini bukan sekadar mencerminkan karakteristik teknologi produksi yang berbeda, tetapi merupakan indikator ketimpangan struktural yang akut. Sektor pertambangan, yang sangat padat modal dan teknologi, menciptakan nilai tambah yang sangat besar namun hanya dengan sedikit tenaga kerja. Sebaliknya, sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup hampir separuh angkatan kerja Sumsel memiliki produktivitas yang sangat rendah, mengindikasikan kelebihan tenaga kerja (*labor surplus*) dan praktik produksi tradisional. Ketiadaan sektor antara (*intermediate sector*) yang mampu menyerap tenaga kerja dari pertanian ke aktivitas bernilai tambah lebih tinggi inilah yang menjadi inti persoalan.

Untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan output di masing-masing sektor mampu menciptakan lapangan kerja—dan dengan demikian menguji *resource movement effect*—dilakukan analisis elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas dihitung sebagai rasio persentase perubahan jumlah tenaga kerja terhadap persentase perubahan PDRB antara tahun 2023 dan 2024. Tabel 5 menampilkan hasil perhitungan.

Tabel 5. Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral, Sumsel 2023–2024.

Sektor	Δ PDRB (%)	Δ Tenaga Kerja (%)	Elastisitas
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	+2,41	+3,15	1,31
Pertambangan dan Penggalian	+3,31	-4,26	-1,29

Hasil perhitungan memberikan gambaran yang sangat jelas dan sekaligus ironis:

- a. Sektor Pertanian memiliki elastisitas 1,31. Nilai >1 ini menunjukkan bahwa pertumbuhan output di sektor pertanian masih direspons secara elastis oleh penyerapan tenaga kerja. Dalam logika ekonomi dualistik, ini menandakan sektor pertanian masih berfungsi sebagai *sektor penampung (residual sector)* yang menyerap kelebihan pasokan tenaga kerja, meskipun dengan produktivitas yang terus merosot (Todaro, 1969; Fields, 2005). Pertumbuhan PDRB pertanian sebesar 2,41% ternyata diiringi oleh peningkatan tenaga kerja sebesar 3,15%, sebuah pola yang justru memperkuat hipotesis bahwa pertanian

menjadi katup pengaman (*safety valve*) bagi tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor modern.

- b. Sektor Pertambangan justru menunjukkan fenomena sebaliknya secara ekstrem. Meskipun PDRB-nya tumbuh 3,31%, jumlah tenaga kerja di sektor ini justru menyusut 4,26%, menghasilkan elastisitas negatif sebesar $-1,29$. Ini berarti setiap 1% pertumbuhan output di pertambangan sama sekali tidak menciptakan lapangan kerja baru, melainkan diiringi oleh pengurangan tenaga kerja. Temuan ini merupakan bukti paling telak dari karakter padat modal sektor ekstraktif dan sekaligus mengonfirmasi kegagalan mekanisme *resource movement effect*. Booming sektor pertambangan bukan hanya tidak menyerap tenaga kerja dari sektor lain, tetapi juga gagal mempertahankan tenaga kerjanya sendiri. Investasi besar yang mengalir ke sektor ini lebih banyak digunakan untuk pembelian mesin, otomatisasi, dan peningkatan kapasitas modal, bukan untuk perluasan kesempatan kerja (Corden & Neary, 1982).

Dengan demikian, paradoks produktivitas yang telah diidentifikasi sepenuhnya merupakan manifestasi dari kegagalan *resource movement*. Alih-alih menciptakan efek penetes (*trickle-down*) dan transfer tenaga kerja dari sektor tradisional ke modern sebagaimana diidealkan oleh model Lewis (1954), booming sumber daya alam di Sumsel justru menciptakan dualisme yang semakin tajam. Sektor pertambangan menjadi “pulau kemakmuran” yang terisolasi, dikelilingi oleh “lautan” sektor pertanian tradisional dan jasa informal yang menampung mayoritas penduduk. Kondisi ini persis seperti yang digambarkan oleh Fields (2005) sebagai pasar kerja dualistik yang persisten, di mana sektor modern tidak mampu menyerap surplus tenaga kerja, sehingga sektor tradisional terus menggembung dan memerangkap angkatan kerja dalam produktivitas rendah. Inilah inti dari jebakan sumber daya alam di Sumatera Selatan: kekayaan alam yang melimpah tidak menjadi pendorong transformasi ekonomi yang inklusif, melainkan menjadi penghalang bagi terciptanya industrialisasi yang berkeadilan. Tanpa intervensi kebijakan yang mampu memutus siklus ini, Sumsel akan terus berada dalam *equilibrium* inferior—kaya secara agregat, namun miskin secara struktural (Sachs & Warner, 2001; Gylfason, 2001).

Hilirisasi sebagai Strategi

Temuan-temuan empiris yang telah diuraikan—dominasi ekstraktif yang ekstrem, stagnasi industri pengolahan yang prospektif namun tak kunjung basis, paradoks produktivitas antara pertambangan dan pertanian, serta kegagalan *resource movement effect* yang memerangkap tenaga kerja di sektor tradisional—mengarah pada satu kesimpulan mendasar: Sumatera Selatan memerlukan intervensi kebijakan struktural yang mampu mengoreksi

distorsi pasar faktor produksi yang ditimbulkan oleh *booming* sumber daya alam. Dalam konteks ini, hilirisasi komoditas unggulan (batubara, kelapa sawit, dan karet) bukan sekadar strategi peningkatan nilai tambah (*value addition*), melainkan sebuah instrumen fundamental untuk memutus jebakan sumber daya alam (*resource curse trap*).

Dalam perspektif teori *Dutch disease*, inti permasalahan di Sumsel adalah adanya *resource movement effect* yang menarik modal, tenaga kerja terampil, dan insentif kebijakan ke sektor ekstraktif sehingga sektor *non-booming tradable*—khususnya industri pengolahan—mengalami kontraksi relatif (Corden & Neary, 1982; van Wijnbergen, 1984). Kebijakan hilirisasi dapat berperan sebagai “kekuatan penyeimbang artifisial” (*artificial countervailing force*) yang mengembalikan daya tarik sektor sekunder. Dengan mewajibkan atau memberikan insentif kuat bagi aktivitas pengolahan di dalam negeri, pemerintah secara langsung menciptakan *demand* baru untuk investasi di sektor industri pengolahan dan, yang lebih penting, *demand* untuk tenaga kerja sektor sekunder. Investasi di pabrik pengolahan batubara (gasifikasi, kokas), kilang biodiesel dan oleokimia dari CPO, serta pabrik crumb rubber dan barang jadi karet akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu “menyaingi” daya tarik sektor tambang hulu. Dengan demikian, hilirisasi bukan hanya memperpanjang rantai nilai, tetapi juga mengoreksi distorsi alokasi sumber daya yang selama ini menghambat industrialisasi (Auty, 2001; Sachs & Warner, 2001).

Identifikasi Sektor Prospektif Berbasis DLQ: Justifikasi *Supply-Side*

Kekhawatiran umum terhadap kebijakan hilirisasi adalah apakah sektor industri pengolahan di daerah memiliki kapasitas *supply-side* untuk tumbuh. Hasil analisis DLQ yang telah dipaparkan memberikan justifikasi empiris yang kuat. Sektor Industri Pengolahan Sumsel memiliki rata-rata DLQ sebesar 1,00—bahkan di beberapa tahun di atas 1—yang menunjukkan bahwa secara potensi pertumbuhan, sektor ini mampu bersaing dan memiliki prospek untuk menjadi unggulan. Artinya, dari sisi fundamental, hambatan bukan terletak pada ketidakmampuan sektor untuk tumbuh, melainkan pada kurangnya insentif dan iklim investasi yang memadai untuk mengaktualisasikan potensi tersebut. Temuan ini selaras dengan argumen Gylfason (2001) bahwa negara/kawasan kaya SDA seringkali memiliki potensi industri yang terpendam, dan yang diperlukan adalah kebijakan afirmatif untuk “membangunkan” potensi itu. Dengan kata lain, sektor industri pengolahan Sumsel adalah “raksasa yang sedang tidur”; kebijakan hilirisasi berfungsi sebagai *trigger* untuk membangunkannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dilakukan, ditarik tiga kesimpulan utama yang saling mengonfirmasi. *Pertama*, Penurunan kontribusi sektor pertanian dari 19,01% menjadi 15,71% tidak diikuti oleh kenaikan peran industri pengolahan, yang justru stagnan di kisaran 18,13%–18,92%. Sebaliknya, sektor pertambangan tetap dominan dengan pangsa di atas 21%, sementara sektor jasa (perdagangan, akomodasi, informasi) tumbuh pesat dari 14,00% menjadi 17,73. *Kedua*, analisis SLQ dan DLQ mengonfirmasi bahwa Sumsel terjebak dalam spesialisasi ekstraktif yang ekstrem. Nilai SLQ pertambangan rata-rata 2,78 menunjukkan tingkat spesialisasi hampir tiga kali lipat dari rata-rata nasional, sementara SLQ industri pengolahan hanya 0,86 (non-basis). *Ketiga*, Produktivitas tenaga kerja pertambangan (Rp1,013 miliar per pekerja) 34,5 kali lipat lebih tinggi dibanding pertanian (Rp29,35 juta). Namun, sektor tambang hanya menyerap 1,88% tenaga kerja, sementara pertanian menampung 45,30%. Analisis elastisitas kesempatan kerja memperkuat temuan ini: pertumbuhan PDRB tambang 3,31% justru diiringi kontraksi tenaga kerja –4,26% (elastisitas –1,29), sedangkan pertanian dengan pertumbuhan 2,41% menyerap tambahan tenaga kerja 3,15% (elastisitas 1,31).

Melalui penelitian ini disarankan Pemerintah daerah dan pusat perlu mempercepat pembangunan industri pengolahan di sentra komoditas: gasifikasi dan kokas batubara di Muara Enim dan Muba, kilang biodiesel dan oleokimia di OKI, serta industri karet remah dan barang jadi di Lahat dan Musi Rawas. Hilirisasi bukan sekadar meningkatkan nilai tambah, melainkan mengoreksi distorsi alokasi faktor produksi yang selama ini timpang ke sektor ekstraktif. Pembangunan infrastruktur konektivitas. Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan Industri Terpadu di dekat sentra produksi dapat menjadi solusi kelembagaan. Pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri hilir. Studi selanjutnya disarankan melengkapi analisis tersebut untuk mengaitkan fluktuasi harga global dengan ketimpangan antardaerah di Sumsel. Studi komparatif antarprovinsi. Membandingkan Sumsel dengan provinsi kaya SDA lain (Kaltim, Riau, Kalsel) akan memperkaya pemahaman tentang variasi mekanisme Dutch disease regional dan efektivitas kebijakan hilirisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Akita, T., & Miyata, S. (2010). The bi-dimensional decomposition of regional inequality based on the weighted coefficient of variation. *Letters in Spatial and Resource Sciences*, 3(3), 91–100. <https://doi.org/10.1007/s12076-010-0039-3>
- Auty, R. M. (2001). The political economy of resource-driven growth. *European Economic Review*, 45(4–6), 839–846. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00126-X](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00126-X)
- Chenery, H. B. (1979). *Structural change and development policy*. Oxford University Press.

- Chenery, H. B., & Syrquin, M. (1975). *Patterns of development, 1950–1970*. Oxford University Press.
- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and de-industrialisation in a small open economy. *The Economic Journal*, 92(368), 825–848. <https://doi.org/10.2307/2232670>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fields, G. S. (2005). *A guide to multisector labor market models* (Social Protection Discussion Paper Series, No. 0505). World Bank.
- Gylfason, T. (2001). Natural resources, education, and economic development. *European Economic Review*, 45(4–6), 847–859. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00127-1](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00127-1)
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Isard, W. (1960). *Methods of regional analysis: An introduction to regional science*. MIT Press.
- Kuznets, S. (1973). Modern economic growth: Findings and reflections. *The American Economic Review*, 63(3), 247–258. [suspicious link removed]
- La Porta, R., & Shleifer, A. (2014). Informality and development. *Journal of Economic Perspectives*, 28(3), 109–126. <https://doi.org/10.1257/jep.28.3.109>
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- McMillan, M. S., & Rodrik, D. (2011). *Globalization, structural change and productivity growth* (NBER Working Paper No. 17143). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w17143>
- Nugroho, A. E., & Prasetyo, P. E. (2021). Resource curse dan ketimpangan regional di Indonesia: Analisis data panel provinsi 2010–2019. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(2), 295–312. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2021.v14.i02.p06>
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1–33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. *European Economic Review*, 45(4–6), 827–838. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00125-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8)
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.
- Temple, J. (2005). Dual economy models: A primer for growth economists. *The Manchester School*, 73(4), 435–478. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2005.00455.x>
- Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. *The American Economic Review*, 59(1), 138–148.
- van Wijnbergen, S. (1984). The ‘Dutch disease’: A disease after all? *The Economic Journal*, 94(373), 41–55. <https://doi.org/10.2307/2232214>
- Venables, A. J. (2016). Using natural resources for development: Why has it proven so difficult? *Journal of Economic Perspectives*, 30(1), 161–184. <https://doi.org/10.1257/jep.30.1.161>